

171 Bus Sekolah Kembali Beroperasi untuk Tunjang PTM Terbatas

JAKARTA (IM) - Kepala UP Angkatan Sekolah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ali Murtado mengatakan, Pemprov DKI kembali mengoperasikan 171 bus sekolah setelah sempat dihentikan sementara karena pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, pengoperasian 171 bus sekolah tersebut untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang kembali dibuka secara terbatas. "Ada 171 (bus sekolah) kita gunakan untuk (penunjang) PTM," kata Ali saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/11).

Ali mengatakan, saat ini kapasitas setiap bus sekolah masih dibatasi 75 persen. Namun akan dilakukan evaluasi seiring dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 di Jakarta. "Mungkin hari ini kita naikkan kapasitasnya menjadi 100 persen

dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Ali.

Ali mengatakan, 171 bus akan beroperasi di 33 rute yang akan melintasi sekolah-sekolah yang ada. Dia menyebut, operasional bus sekolah berlaku untuk seluruh jenjang sekolah, baik SD, SMP hingga SMA. Selain sebagai penunjang PTM, Ali mengatakan, bus sekolah bisa menjadi pilihan siswa dan orangtua agar lebih menghemat uang saku.

"Gratis, itu yang pertama," kata Ali. Kedua, bus sekolah bisa menjamin kenyamanan untuk para siswa dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.

Dia berharap operasional 171 bus sekolah tersebut bisa mengembalikan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka tanpa was-was terpapar Covid-19 di jalan menuju sekolah. "Kita berharap operasional bus sekolah ini bisa teroptimalkan dengan baik untuk transportasi pelajar," ujar dia. ● yan

Heroik, 3 Petugas PPSU Selamatkan Nyawa Bocah yang Tenggelam di BKT

JAKARTA (IM) - Tiga petugas Penanganan Prasarana dan Saranan Umum (PPSU) Cipinang Muara menyelamatkan seorang bocah berinisial N (11) yang tenggelam di aliran kali Banjar Kanal Timur (BKT), Selasa (2/11). Berkat aksi heroik itu, nyawa N berhasil tertolong.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB, N bersama temannya tengah bermain di aliran kali BKT. Nahas, saat tengah bercanda bersama ketiga rekannya, N tercebur ke kali BKT.

"Itu sudah disuruh naik sama warga karena posisi kan habis hujan arus kencang. Tapi mereka ngeyel enggak mau naik malah bercanda. Akhirnya kecebur," terang Joko seorang petugas PPSU yang menyelamatkan nyawa bocah 11 tahun, di Jakarta Timur, Rabu (3/11).

Lantaran tak bisa berenang, N yang sudah terbawa arus aliran BKT berteriak minta tolong. Beruntung

teriakan itu didengar Joko dan rekannya seprofesinya saat melintas di Jalan BKT.

"Tolong, tolong... Bang itu teman saya ke bawa arus. Saya lari ke bawah terus masih ngelihat rambutnya saya nyebut buat nolung dia," ucapnya.

Penyelamatan berjalan dramatis. Pasalnya, Joko sempat terdorong arus sehingga Joko kehilangan korban. Namun, tak gengaja kaki Joko saat sedang berenang menyentuh tubuh korban.

"Langsung aja pas kerasa itu orang saya angkat, tapi karena derasnya air saya minta tolong temannya buat bantu angkat korban ke atas," tuturnya.

Setelah berhasil diangkat, N kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. "Ditolong dulu sama kita buat ngeluarin air, enggak lama air yang masuk itu keluar semua baru dibawa ke rumah sakit," tuturnya. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



POLISI TAK TILANG KENDARAAN YANG BELUM UJI EMISI

Wagub DKI akan Koordinasi dengan Polda Metro Jaya

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemberlakuan sanksi tilang bagi kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Kewajiban melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor itu akan berdampak pada kesehatan warga DKI Jakarta, kata Wagub DKI, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan bakal berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait sanksi dan kewajiban uji emisi pada kendaraan bermotor. Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan menentukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang sudah

ditetapkan sebelumnya.

"Nanti akan dikoordinasikan terus sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait uji emisi," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/11).

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemberlakuan sanksi

tilang bagi kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Kata dia, kewajiban melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor akan berdampak pada kesehatan warga DKI Jakarta. "Yang penting semua yang memiliki kendaraan agar memastikan kendaraannya untuk dilakukan uji emisi bagi kesehatan dan keselamatan kita semua," ucap Riza.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menyebut kendaraan yang belum melakukan atau tidak lulus uji emisi tidak langsung ditilang saat pemberlakuan sanksi 13 November 2021. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono mengatakan akan memberlakukan sanksi tegas sebagai bentuk sos-

ialisasi kebijakan. "Sebetulnya sanksi ini kan ada berbagai macam, ada tilang ada teguran. Jadi kalau kami lihat trennya lebih akan terapkan teguran dulu sebelum terapkan sanksi," tutur Argo.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal memberlakukan penindakan sanksi berupa tilang untuk seluruh kendaraan yang tidak melakukan atau lulus uji emisi per 13 November 2021.

Penindakan tersebut

UNDERPASS BULAK KAPAL DITARGETKAN SELESAI AKHIR TAHUN 2021

Foto udara pembangunan underpass Bulak Kapal, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/11). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Underpass Bulak Kapal selesai akhir tahun 2021 untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut dan saat ini pembangunan telah mencapai 90,43 persen.

Wagub DKI: Dana Penanggulangan Sampah, akan Didiskusikan dengan DPRD

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) membenarkan adanya permintaan bantuan dari daerah peyangga Jakarta soal penanganan banjir. Dia mengatakan, pihaknya bakal diskusi terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta.

"Ya memang beberapa daerah sekitar Jakarta ada yang meminta bantuan dari DKI Jakarta terkait penanga-

nan banjir. Nanti semua akan didiskusikan bersama DPRD, mana daerah-daerah peyangga Jakarta yang dimungkinkan mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta seperti tahun tahun sebelumnya," kata Ariza di Jakarta, Rabu (3/11).

Menurutnya, hal itu bisa saja dikabulkan asal betul-betul bermanfaat dalam menanggulangi banjir.

"Jadi memang itu dimungkinkan sejauh alasan yang dapat

diterima dan rasional. Apakah terkait masalah transportasi, pengendalian banjir, dan masalah lainnya," terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan bantuan yang diberikan kepada Pemkot Bekasi perihal sampah. "Seperti masalah sampah upamannya di Bekasi itu memang ada bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi, nanti semua akan kita diskusikan sama DPRD DKI," tutupnya. ● yan

Pegiat Lingkungan Desak Sanksi ke Pembuang Limbah

BEKASI (IM) - Pegiat lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan sanksi kepada pabrik pembuang limbah di Kali Rasmi, yang berlokasi Kampung Pelaukan, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.

Selain Kali Rasmi, busa berbuih putih juga terlihat di aliran kali Cikarang, tepatnya di Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, buih busa masih tampak di kedua kali tersebut. Berdasarkan penelusuran sumber limbah berasal dari Perusahaan

berinisial U.

"Kami hanya bisa mendorong agar Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan sanksi kepada pabrik pembuang limbah di Kali Rasmi," kata Ketua Harian Save Kali Cikarang, Dede Kurniawan, Rabu (3/11).

Dia mengatakan, telah melakukan penelusuran terhadap pabrik pembuang limbah busa tersebut di Kawasan Industri Jababeka. "Kita sudah ketahui sumber limbah tersebut berasal dari perusahaan berinisial U," imbuhnya.

Menurutnya, pabrik tersebut memiliki saluran pem-

buangan limbah ke kali namun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak difungsikan secara optimal karena menghemat biaya operasional.

"Pada saat terjadinya hujan, saluran IPAL dibuka bersamaan turunnya hujan tanpa ada pengolahan air limbah karena dapat menghemat biaya listrik dengan tidak menghidupkan mesin, menghemat bahan kimia dan sebagainya," bebarnya.

Kuat dugaan, kata dia, limbah busa tersebut berasal dari bahan kimia pembuat sabun dan sejenisnya lalu terakumulasi dengan air hujan dan aliran kali sehingga menimbulkan busa berbuih. ● yan

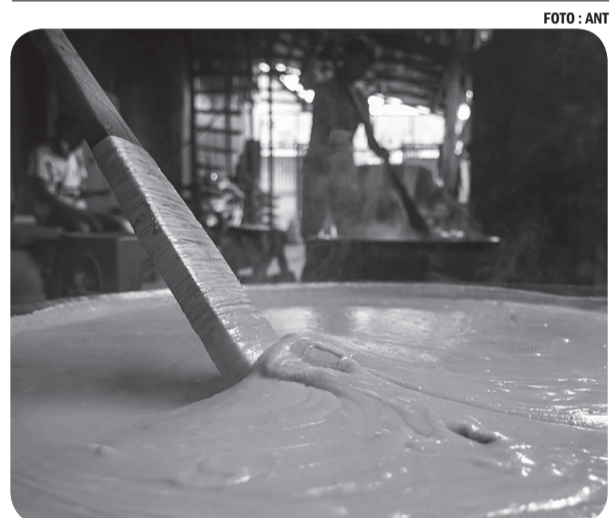


FOTO: ANT

SEBANYAK 287.000 UMKM BARU TUMBUH DI JAKARTA

Pekerja mengaduk adonan dodol Betawi di pembuatan dodol rumah-rumahan kawasan Rawajati, Jakarta, Rabu (3/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah menumbuhkan pelaku usaha baru atau Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) sebanyak 287 ribu UMKM di Jakarta melalui program Jakpreneur.

Pemprov DKI Tunggu Stok Vaksin Covid-19 untuk Anak Usia 6-11 Tahun

JAKARTA (IM) - Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang menunggu stok vaksin Covid-19 Sinovac untuk target anak usia 6-11 tahun. Dwi menjelaskan, stok vaksin yang ada saat ini sudah dialokasikan untuk anak usia 12 tahun ke atas.

"Sekarang kan kebutuhan vaksin digunakan untuk usia 12 tahun ke atas, sekarang usia 6-11 kita menunggu juga stok vaksinnya," tutur Dwi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/11).

Dwi menjelaskan, perhitungan kasar target vaksinasi Covid-19 di Jakarta untuk anak usia 6-11 tahun berkisar 900.000-1 juta orang.

Perhitungan tersebut diambil dari rata-rata kelahiran per tahun di Jakarta mencapai 100.000-150.000 ribu orang. "Jadi kalau usia 6-11 tahun ada 6 satuan tahun dikalikan 150.000, sekitar 900.000-1 juta," tutur Dwi.

Jika merujuk dari perhitungan kasar, jumlah vaksin

Covid-19 Sinovac yang harus disediakan di Jakarta berkisar 1,8-2 juta dosis. Mengingat dosis vaksin, kata Dwi, diperkirakan tetap disuntikkan dua kali seperti yang dilakukan pada penerima vaksin orang dewasa.

"Kebijakan kemungkinan dua kali suntik, dua dosis," ucap dia.

Sedangkan terkait pelaksanaan, Dwi menjelaskan ada kemungkinan vaksinasi akan dilakukan di sekolah seperti yang sudah dilakukan pada usia 12 tahun ke atas.

Dinkes DKI Jakarta sudah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil untuk mendata dengan akurat penerima vaksinasi Covid-19. Namun terkait pelaksanaan teknis, Dwi mengesankan Pemprov DKI Jakarta akan menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat, termasuk waktu pelaksanaan vaksinasi.

"Kita kembali menunggu regulasi Kemenkes kapan boleh diberikan. Karena lebih teknis belum dikeluarkan oleh Kemenkes," ucap dia. ● yan

IDN/ANTARA



OKUPANSI HOTEL JAKARTA MENINGKAT

Petugas merapikan kasur salah satu kamar di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Jakarta, Rabu (3/11). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat rata-rata tingkat hunian hotel bintang satu hingga lima di Jakarta pada September 2021 sebesar 42,6 persen atau naik 11,8 persen dibandingkan Agustus 2021 karena didorong pelonggaran PPKM.

PERINGATAN PERTAMA DAN TERAKHIR
Kepada Sdr. NARAINDAS KISHINCHAND J
Di: Jalan Agung Tengah XI, Blok 1-9, Nomor 9 A, Sunter Agung, Jakarta Utara.
Agar melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 126/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 571/Pdt/2018/Pt.DKI Jo Putusan Mahkamah Agung No. 947/K/Pdt/2020 yang isinya sebagai berikut:
Dalam Rekonvensi
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menukarkan bilyet-bilyet giro Tergugat Rekonvensi yang kosong kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bilyet giro BCA Nomor DN 755174 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 29 September 2016;
- Bilyet giro BCA Nomor DO 744785 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 Oktober 2016;
- Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Dst--
Bahwa kewajiban tersebut diatas telah dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,- maka sisa kewajiban saudara yang belum dilaksanakan adalah sebesar Rp.720.000.000,-. Untuk itu kami memberikan peringatan kepada saudara agar membayarkan sisa kewajiban tersebut dalam waktu 7 hari kalender dari terbitnya peringatan ini.
Kuasa Hukum
Titin Silvarian SH
(Kuasa Hukum Tn. Rajinder Arjandas A.)